

**SKRIPSI**  
**PERSEPSI *STAKEHOLDER* TERHADAP TRANSPARANSI**  
**LAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI**  
**(Studi Kasus Universitas Sulawesi Barat)**



**RIZKY NURWANTO**

**C02 16 333**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2023**

## ABSTRAK

**RIZKY NURWANTO, 2023.** Persepsi *Stakeholder* Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri (Studi Kasus Universitas Sulawesi Barat). (Dibimbing oleh **Sitti Hadijah,S.PD.,M.Ak** Selaku Pembimbing I dan **Jumardi,SE.,M.Si** Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi *stakeholder* terhadap transparansi keuangan perguruan tinggi negeri di Universitas Sulawesi Barat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh Kasubag Umum dan Keuangan beserta Staf dan Mahasiswa Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi *stakeholder* berpengaruh signifikan dalam transparansi laporan keuangan. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) 0,767 yang menunjukkan bahwa perubahan variabel dependen 76,7% sedangkan sisanya 23,3% diterangkan oleh faktor lain diluar model regresi yang dianalisis.

**Kata Kunci :** Persepsi, *Stakeholder*, Laporan Keuangan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal - hal yang menyangkut pertanggungjawaban sebagai *instrument* untuk kegiatan *control* terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik, salah satunya pada ruang lingkup pendidikan.

Menurut Ari Krisnayanti (2014) Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang, karena dengan pendidikan yang memadai seseorang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Namun di zaman globalisasi ini pendidikan menjadi sesuatu yang mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi kebawah. Saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, salah satu diantaranya adalah terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah di bidang pendidikan.

Universitas Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Unsulbar adalah Perguruan Tinggi Negeri dan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertekad untuk senantiasa menyiapkan sumber daya manusia terdidik yang berkualitas sebagai

tenaga ahli dan/atau profesional yang memiliki nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan kreativitas serta mampu menggali, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan., Unsulbar merupakan Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Unsulbar didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat tanggal 13 Mei 2013. Mengingat Unsubar merupakan Perguruan Tinggi Negeri baru , tentunya masih banyak yang harus dibenah dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Sulawesi Barat terjadi perubahan struktur organisasi yaitu penggabungan pada Biro yang sebelumnya ada 2 (dua) yaitu Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dan Biro Umum dan Keuangan menjadi 1 (satu) yaitu Biro Akademik dan Umum. Unsulbar mempunyai Dewan Pertimbangan yang keanggotaannya merupakan perpaduan antara pejabat pemerintah dengan tokoh masyarakat dan industri. Dalam menjalankan tugasnya Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Dalam tugas sehari-hari Rektor dan Wakil Rektor secara administratif dibantu oleh Kepala Biro Akademik dan Umum. Sedang untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dibentuk beberapa Unit Pelaksana Teknis. Untuk mendukung percepatan pengembangan Unsulbar maka dibentuk Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan

Penjaminan Mutu. Berdasar keadaan yang ada dimana pengelolaan keuangan khususnya transparansi dikatakan masih ditemukan adanya penyimpangan seperti dalam pengelolaan keuangan Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi serta mempertimbangkan kondisi umum dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing regional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mencermati potret permasalahan-permasalahan maka Unsulbar menyusun, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis salah satunya yaitu Membangun sistem tata kelola yang bermutu, transparan, dan bertanggung jawab (Lakip 2020). Sebagaimana Perguruan Tinggi Negeri Baru lainnya di Indonesia, Unsulbar dalam mengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan menjalankan Visi dan Misinya menghadapi kendala dan permasalahan. Di tahun 2013 dengan beralihnya status Unsulbar menjadi Perguruan Tinggi Negeri, praktis Organisasi dan Tata Kelola, SDM, Keuangan, dan Aset atau Sarana dan Prasarana sangatlah berbeda dibandingkan ketika masih menjadi Yayasan. Setelah menjadi PTN semua bentuk kegiatan harus mengikuti Peraturan Pemerintah,

sementara SDM yang dimiliki belum semuanya mengerti dan memahami hal tersebut sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan dan pembelajaran pada instansi yang terkait serta Manajemen organisasi, penilaian mahasiswa dan lulusan terhadap organisasi masih belum optimal, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan tinggi pelaksanaannya masih terbatas dilihat dari jumlah maupun kualitasnya maka sangat perlu dilakukan audit secara konsisten untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan tentu saja harus diikuti dengan peningkatan di sisi akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013, aset adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang meruakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan dimana sistem akuntansi adalah proses indentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian transaksi dan kejadian keuangan serta pengiterprestasian atas hasil pelaporan Pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dana, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Laporan Akuntabilitas Universitas Sulawesi Barat merupakan wujud pertanggungjawaban institusi pemerintah terhadap publik dan para *stakeholder* yang sifatnya wajib menjunjung tinggi aspek transparansi dan akuntabilitas dimana sistem perencanaan dan penganggaran belum dijalankan secara terukur dan konsisten, karena penyusunan perencanaan program dan anggaran sebagian masih

berbasis “keinginan” belum berbasis “kebutuhan institusional” sehingga memperbesar potensi untuk melakukan revisi dokumen perencanaan yang telah tersusun (Lakip). Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan yang sampai saat ini terus dikaji oleh berbagai pihak. Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik, ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum (Hanapi, 2010) Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini peneliti beri judul *Persepsi Stakeholder Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri (Studi Kasus Universitas Sulawesi Barat)*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti ingin mengetahui

1. Apakah *Persepsi Stakeholder* berpengaruh Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Sulawesi Barat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui apakah Persepsi *Stakeholder* berpengaruh Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Sulawesi Barat ?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran dalam perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah khususnya pada Univeristas Negeri Sulawesi Barat gunamewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan adanya nilai-nilai transparansi atau keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan birokrasi.



2. Penelitian ini dapat dijadikan wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teoritik**

##### **2.1.1 Pengertian Persepsi *Stakeholder***

Presepsi *stakholder* menurut Hertifah (2011) *Stakeholder* adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positive atau negative) oleh suatu kegiatan program pembangunan sedangkan menurut Nugroho (2014) *stakeholder* dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu,

1. Policy creator *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator, *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
3. Fasilitator, *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementer, *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator, *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya Intern Pemerintah (APIP), bahwa Kapabilitas APIP yang di dalamnya termasuk Inspektorat Kabupaten/Kota adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang

saling terkait yaitu, kapasitas, kewenangan, kompetensi SDM APIP. Tiga unsur tersebut harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

### **2.1.2 Prinsip - Prinsip Stakeholder**

Menurut Wahyudin 2013 ada beberapa prinsip stakeholder yaitu:

1. Manajer harus mengakui dan secara aktif memantau kekhawatiran semua pemangku kepentingan yang sah, dan harus mempertimbangkan kepentingan mereka secara tepat dalam pengambilan keputusan dan operasi.
2. Manajer harus mendengarkan dan secara terbuka berkomunikasi dengan pemangku kepentingan mengenai keprihatinan serta kontribusi masing-masing, dan tentang risiko yang mereka asumsikan karena keterlibatan mereka dengan korporasi.
3. Manajer harus mengadopsi proses serta cara perilaku yang sensitif terhadap keprihatinan dan kemampuan masing-masing konstituen pemangku kepentingan.
4. Manajer harus mengenali saling ketergantungan antara upaya serta penghargaan di antara para pemangku kepentingan, dan harus berupaya mencapai distribusi yang adil atas manfaat dan beban kegiatan perusahaan di antara mereka, dengan mempertimbangkan risiko dan kerentanan masing-masing.
5. Manajer harus bekerja sama dengan entitas lain, baik publik maupun swasta, untuk memastikan bahwa risiko dan kerugian yang timbul dari

aktivitas perusahaan diminimalkan dan, di mana hal itu tidak dapat dihindari, diberi kompensasi yang tepat.

6. Manajer harus menghindari kegiatan yang sama sekali dapat membahayakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut (mis., Hak untuk hidup) atau menimbulkan risiko yang, jika dipahami secara jelas, tidak akan dapat diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan yang relevan.
7. Manajer harus mengakui potensi konflik antara peran mereka sendiri sebagai pemangku kepentingan perusahaan, dan tanggung jawab hukum dan moral mereka untuk kepentingan semua pemangku kepentingan, dan harus mengatasi konflik tersebut melalui komunikasi terbuka, pelaporan yang sesuai dan sistem insentif dan, jika perlu, review pihak ketiga.

### **2.1.3 Persepsi**

Persepsi adalah cara individu mengorganisir dan menginterpretasikan informasi sensorik yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Ini mencakup proses bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan merasakan dunia di sekitar kita. Persepsi melibatkan interpretasi subjektif dari rangsangan sensorik berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, dan harapan individu.

Dalam konteks psikologi, persepsi merujuk pada cara pikiran mengelompokkan, mengenali, dan memberi arti pada sensasi fisik. Ini bukan sekadar respons mekanis terhadap stimulus, tetapi juga melibatkan

proses kognitif yang lebih dalam. Persepsi dapat bervariasi dari individu ke individu karena melibatkan faktor-faktor subjektif seperti latar belakang budaya, pengalaman hidup, dan emosi.

Dalam penelitian atau konteks akademis lainnya, persepsi sering kali menjadi fokus dalam analisis sosial, psikologi sosial, ilmu politik, dan bidang-bidang lain yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok menginterpretasikan dunia disekitar mereka. Persepsi sangat memengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan, membentuk sikap, dan membentuk pandangan dunia mereka.

Albert Bandura (2021) Psikolog sosial terkenal, Bandura, mendefinisikan persepsi sebagai "proses di mana individu menginterpretasikan apa yang mereka lihat, mendengar, dan merasakan untuk memberi arti terhadap pengalaman mereka.

Jerome Bruner (2016) Ahli psikologi kognitif, Bruner, menggambarkan persepsi sebagai "kemampuan otak untuk memberi arti pada pengalaman melalui pengorganisasian dan interpretasi informasi sensorik.

#### **2.1.4 Kriteria Persepsi**

Indikator persepsi adalah parameter atau tanda-tanda yang digunakan untuk mengukur atau menilai bagaimana seseorang atau kelompok menginterpretasikan atau memahami suatu fenomena atau situasi tertentu. Indikator ini membantu dalam mengukur perasaan, pandangan, atau sikap subjektif yang mungkin sulit diukur secara langsung.

Misalnya, jika anda ingin mengukur persepsi terhadap suatu pelayanan kepada masyarakat, anda dapat menggunakan beberapa indikator seperti:

1. Tingkat kepuasan : seberapa puaskah pelanggan/ masyarakat terhadap layanan yang di berikan.
2. Tingkat keluhan : seberapa banyak keluhan yang diterima dari pelanggan/ masyarakat.
3. Tingkat keluhan yang di selesaikan : seberapa banyak keluhan yang berhasil di selesaikan dengan baik.
4. Tingkat penanggulangan : seberapa sering pelanggan/ masyarakat kembali untuk membeli dan menerima pelayanan, ini mencerminkan kepuasan jangka panjang pelanggan/ masyarakat.
5. Waktu respon terhadap pertanyaan : seberapa lama perusahaan/jasa merespon masalah pelanggan/ masyarakat.

### **2.1.5 Transparansi Laporan Keuangan**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan. Pendapat lain mengatakan transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan.

### **2.1.6 Kriteria Transparansi**

#### **1. Ketersediaan system informasi**

Salah satu penerapan prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah dijalankannya beberapa aplikasi sistem Informasi secara online.

#### **2. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan** Salah satu prinsip pada Tata Kelola adalah transparansi, yaitu adanya asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai universitas secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

#### **3. Publikasi laporan keuangan**

Dengan adanya Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), setiap badan layanan publik memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan sebagai wujud keterbukaan informasi (transparansi) dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Undang-Undang KIP adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan mulai berlaku sejak dua tahun dari pengesahan. Undang-Undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk

membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

#### 4. Hak untuk mengetahui hasil audit

Hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan merupakan bagian dari *right to know* yang dimiliki oleh setiap individu (Kasijan, 2009: 59).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2006) menyatakan bahwa publik sebagai *stakeholder* menilai informasi yang ada dalam laporan keuangan audit pemerintah sampai saat ini belum memenuhi kebutuhan publik atas informasi hasil audit, baik audit keuangan, audit efisiensi dan efektivitas, serta audit kepatuhan. Informasi yang disampaikan hanya sebatas kewajaran dari penyajian laporan keuangan.

#### 5. Ketersediaan informasi kinerja Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi sehingga pihak *stakeholder*, terutama eksternal, dapat menggunakannya untuk mengetahui penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi.

### **2.1.7 Laporan Keuangan Universitas**

Pola pengelolaan keuangan universitas tak lepas dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Perguruan Tinggi dibagi menjadi 2, yaitu: Perguruan Tinggi Negeri, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan



Perguruan Tinggi Swasta, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan aspek otonomi keuangan, otonomi yang diberikan pemerintah kepada Perguruan Tinggi berbeda, dengan memperhatikan pola pengelolaan Perguruan Tinggi yang tertuang pada pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014. Perguruan Tinggi Swasta yang notabene diselenggarakan oleh masyarakat, pengelolaan lembaga nya diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Perguruan Tinggi Negeri, otonomi keuangan yang diberikan oleh pemerintah juga dibedakan berdasarkan pola pengelolaan lembaganya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 :

1. Perguruan Tinggi Negeri dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya; diberikan otonomi untuk penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan b) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perguruan Tinggi Negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau BLU diberikan otonomi untuk mempunyai unit bisnis yang sehat dan mempunyai fleksibilitas dalam penyusunan pelaporan keuangan.
3. Perguruan Tinggi Negeri sebagai badan hukum (PTN BH) diberikan otonomi untuk penetapan norma, kebijakan operasional, dan

pelaksanaan keuangan terdiri atas: perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang, tarif setiap jenis layanan pendidikan dan penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang.

4. Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang, membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi dan memiliki utang piutang jangka pendek dan jangka panjang serta sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.

#### **2.1.8 Pengertian Anggaran**

Menurut Indra (2014: 191) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi telah selesai dilkakukan. anggaran merupakan hasil artikulasi dari perumusan hasil strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah di susun. anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Halim 2014).

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya

dalam satu periode pelaporan, dengan tujuan memberikan informasi tentang seberapa nilai transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan serta realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga perguruan tinggi negeri.

### **2.1.9 Tujuan Anggaran**

Menurut Indra ( 2014 : 86 ) tujuan anggaran terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Sebagai alat perencanaan

Anggaran kecamatan dan desa merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi kecamatan dan desa, yaitu tercapainya kualitas hidup masyarakat yang layak.

2. Sebagai alat pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran dibuat ketika uang kas ada ketika dibutuhkan tanpa anggaran, organisasi kecamatan dan desa tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran.

3. Sebagai alat kebijakan *fiscal*

Sebagai alat kebijakan fiskal, dapat diperkirakan apakah anggaran cukup atau tidak untuk membiayai program dan kegiatan organisasi kecamatan dan desa.

4. Sebagai alat politik

Anggaran dibuat dengan mempertimbangkan alokasi mana yang disepakati masyarakat pada pertemuan-pertemuan desa.

5. Sebagai alat kordinasi dan komunikasi

Anggaran kecamatan dan desa merupakan alat kordinasi serta komunikasi antar bagian dalam organisasi, serta antara organisasi dengan masyarakat.hal ini dimuali sejak penyusunan anggaran kecamatan dan desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

6. Sebagai alat penilaian kinerja

Yaitu kinerja pengelolaan organisasi dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pejabat pelaksana teknis untuk bekerja secara ekonomis,efektif dan efisien dalam mencapai target serta tujuan organisasi.

8. Sebagai alat menciptakan ruang publik

Dalam penyusunannya, anggaran kecamatan maupun desa harusnya melibatkan aparat organisasi dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Hal ini dilakukan agar aspirasi kebutuhan *rill* masyarakat tersampaikan sehingga arah pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

## **2.2 Tinjauan Empirik**

### **2.2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini adalah landasan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian agar peneliti mampu memperbanyak ide dan konsep yang dipakai pada kajian penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa hasil penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

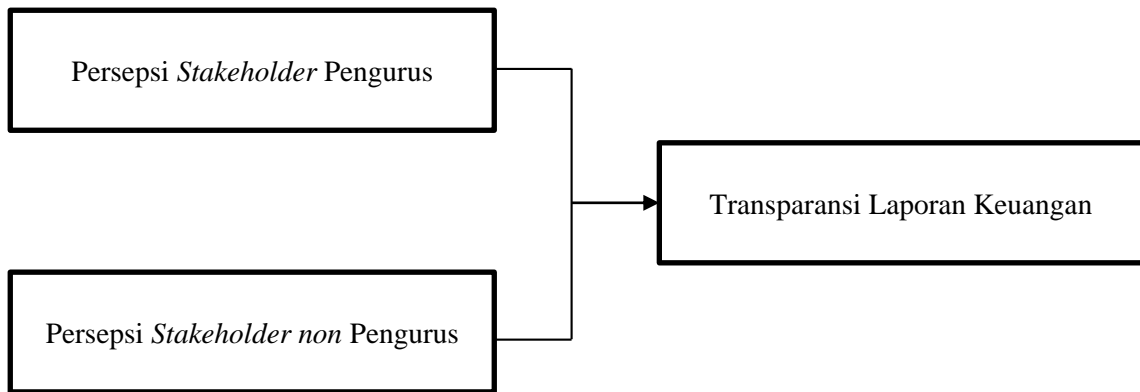
No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal, Rosalia, Warsito Kawedar. Diponegoro Journal Of Accounting. 2017	Implementasi Pelaporan Keuangan Berkas Akrua Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum: Analisis Deskriptif Kualitatif	Sebagai PTN BH, banyak hal yang harus dipersiapkan terkait dengan bidang akademik dan non akademik karena luasnya otonomi yang diberikan. Namun pada penelitian ini, berfokus pada bidang non akademik yaitu keuangan.	Sama -Sama Menganalisis Laporan Keuangan	Memperjelas akuntabilitas dan transparansi serta ada persepsi stakholder pada penelitian ini
2	Hafnati Rahmi  Skripsi 2020. Padang.	Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan Dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepercayaan <i>Stakeholder</i> .	akuntabilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan <i>stakeholder</i> . Sementara transparansi laporan keuangan dan mutu pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan <i>stakeholder</i> .	Sama sama menganalisis tentang laporan keuangan, dana pendidikan dan kepercayaan <i>stakeholder</i>	Analisis data menggunakan software SmartPLS.  Sedangkan peneliti menggunakan Kuesioner berupa daftar pertanyaan yang diolah dengan aplikasi pengolah data spss

3	Jurnal , Ida Ayu putu ari krisnayanti . 2014	Analisis Persepsi <i>Stakeholder</i> Internal dan Eksternal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS Di Smp Negeri 1 Banjar2013	Hasil penelitian menunjukkam bahwa presepsi <i>stakeholder</i> internal pertama tentang transparansi berada pada kategori baik, indokator kedua sampai keempat berada pada kategori baik.	Sama- sama presepsi <i>stakeholder</i> terhadap laporan keuangan	Penelitian ini dilakukan Di SMP 1 banjar
4	Jurnal , publikasi pendidikan 2022	Presepsi skaheholders terhadap dampak implementasi MBKM ( merdeka belajar kampus merdeka)	Guna mendukung tercapainya implementasi mbkm dalam menyiapkan lulusan diperlukan masukan, arahan dari <i>stakeholder</i> internal ataupun eksternal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui presepsi kepuasan stakholder onternal dan eksternal diprodi lingkungan fakultas ilmu pendidikan yang telah mengimplementasikan mbkm	Persamaan- nya adalah sama-sama menganalisis persepsi <i>stakeholder</i> terhadap laporan keuangan dan metode survei digunakan dalam pengumpulan data instrumen yang digunakan adalah angket	perbedaan penelitian ini yaitu pada metode dan tempat penelitian serta instrumen penelitiannya berbeda
5	Tomi Victoria , Skripsi . 2014.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana	SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup	yaitu sama sama meneliti tentang bagaimana presepsi	Tempat penelitian yang berebda yaitu terdapat di Yogyakarta.

		pendidikan di smk muhammadiyah prambanan	dengan skor 75,5% dalam melaksanakan kebijakan yang transparan	<i>stakeholder</i> terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan	
--	--	--	--	---	--

### 2.3 Kerangka Pikir

Menurut Indra ( 2018 : 59 ) perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu proses penyusunan yang sistematis mengenai kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Universitas secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh obyek stimulus yang diterima meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, karena dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja dana sekolah itu dibelanjakan. Persepsi publik selaku *stakeholder* baik pengurus maupun non pengurus terhadap transparansi pengelolaan keuangan Universitas bisa sama dan bisa berbeda, tergantung stimulus yang diterima, hal inilah yang akan diuji dalam penelitian ini sebagaimana tergambar dalam skema di bawah ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:7) Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme.

Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklarifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2015:8). Penelitian ini akan menggambarkan hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap budgetary slack. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner untuk memperoleh data dari lapangan. Data yang diperoleh merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2015:9). Alasan dipilihnya jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan universitas Sulawesi Barat.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil tempat lokasi pada Lembaga Universitas Negeri Sulawesi Barat jln Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Lutang Majene . Sulawesi Barat.

Tabel 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mei				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Ujian Proposal	■											
2	Permintaan izin penelitian						■						
3	Pengumpulan data							■					
4	Pengolahan data							■					
5	Analisis dan interpretasi								■				
6	Penyusunan hasil penelitian										■	■	■

### 3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan ( Sugiono 2016: 32) populasi dalam penelitian ini adalah *Stakeholder* pengurus yang meliputi Kasubag umum dan keuangan. *Stakeholder* non pengurus meliputi mahasiswa.
2. Sampel adalah bagian populasi yang akan dipelajari secara detail, yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Proses pengambilan sampel merupakan proses yang penting. Proses pengambilan sampel harus dapat menghasilkan

sampel yang akurat dan tepat. Sampel yang tidak akurat dan tidak tepat akan memberikan kesimpulan riset yang tidak diharapkan atau dapat menghasilkan kesimpulan salah yang menyesatkan (Jogiyanto, 2010: 73). Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode judgment purposive sampling. Menurut Jogiyanto (2010: 79), judgment purposive sampling adalah pengambilan sampel dari populasi dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur jabatan responden di Universitas Sulawesi Barat, yaitu responden yang berada pada staf kerja bagian umum dan keuangan Universitas Sulawesi Barat serta mahasiswa. Sebanyak 33 responden. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dalam pengumpulan data yang diperlukan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

1. Data Kuantitatif, menurut Sugiyono (2018:23) pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Data Kualitatif, menurut Sugiyono (2018:26) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna, mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung dan melengkapi proses penelitian ini, peneliti melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data yang bersumber dari :

1. Data Primer

- a. Kuesioner

Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk jawabnya (Sugiyono, 2014).

- b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2014).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013:137). Dapat dikatakan data sekunder merupakan data yang diperoleh selain dari hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti selain wawancara dan kuesioner tersebut, yaitu buku-buku, dokumen, jurnal jurnal, dan internet.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Selanjutnya dijelaskan oleh (Sugiyono, 2014), bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, Dokumentasi, Kuisisioner. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2014) adalah semua dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui organisasi. Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah observasi terus terang atau tersamar karena dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dan sebagai bentuk lampiran proses pengambilan data maupun untuk menginput data.

## 3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai tanggapan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dengan cara memberikan pernyataan yang meliputi proses persepsi terhadap transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak Universitas Sulawesi Barat. Penggunaan kuisisioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendukung penelitian.

### **3.6 Tehnik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian mengolah, menganalisis, selanjutnya menginterpretasikan Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terkait Persepsi *Stakeholder* Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri (Studi Kasus Universitas Sulawesi Barat).

## 1. Statistik Deskriptif

Menurut Jogiyanto (2014: 163), statistik deskriptif (*descriptive statistics*) merupakan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Analisis statistik deskriptif akan memaparkan gambaran mengenai data responden antara lain jenis kelamin, usia. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat objek dan data tersebut.

## 2. Uji Validitas

Menurut Ghiselli dalam Jogiyanto (2017: 120), uji validitas menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengungkapkan dengan jitu bagian-bagian gejala yang hendak diukur. Penelitian ini menguji validitas dengan melakukan uji korelasi antara masing-masing skor indikator (skor item pertanyaan) dengan skor konstruk (skor total) atau lebih dikenal dengan uji korelasi "*Pearson Product Moment*". Kriteria pengujian uji validitas menggunakan nilai signifikansi (p-value) : nilai signifikansi  $< 0,05$  berkesimpulan valid dan nilai signifikansi  $> 0,05$  berkesimpulan tidak valid.

## 3. Uji Realibilitas

Menurut Santoso (2016: 127), pengukuran reliabilitas pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua cara.

a. *Repeated Measure* (ukur ulang)

Seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, kemudian dilihat apakah responden tersebut tetap konsistendengan jawaban yang diberikan. Cara ini jarang dilakukan karena selain menghabiskan waktu dan biaya, responden juga belum tentu bersedia ditanya kembali.

b. *One shot*

Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot* dan diuji dengan metode *Cronbach's Alpha*. Adapun klasifikasi nilai *Cronbach's Alpha* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

0,8 - 1,0	: Reliabilitas baik
0,6 - 0,8	: Reliabilitas diterima
Kurang dari 0,6	: Reliabilitas kurang baik

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.



### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah analisa P-P Plot dan Kolmogrov-Smirnov. Rumus Kolmogrov-Smirnov adalah sebagai berikut:

$$KD = 1,36 \frac{\sqrt{n_1+n_2}}{n_1+n_2}$$

Keterangan: KD = Jumlah Kolmogrov-Smirnov yang dicari

$n_1$  = Jumlah populasi yang diperoleh

$n_2$  = Jumlah populasi yang diharapkan

(Sugiyono, 2018)

Data dikatakan normal apabila, nilai signifikan lebih besar 0,05 pada ( $P > 0,05$ ). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada ( $P < 0,05$ ), maka dikatakan tidak normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka, dinamakan *problem multikolinearitas*. Jika terbukti ada multikolinearitas sebaliknya, salah satu independen yang ada

dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2016). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Gujarati, 2016). Menurut Singgih Santoso (2016) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance value}} \text{ atau } Tolerance = \frac{1}{VIF}$$

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antara pengamatan satu ke pengamatan lain. Untuk menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Uji Glejser*.

## 5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis terdiri dari beberapa uji yaitu sebagai berikut:

**a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)**

Menurut Nugroho (2014), uji parsial dengan uji t bertujuan menganalisis besarnya pengaruh masing-masing perubahan independen secara individual (parsial) terhadap perubahan dependen. Hasil dari uji t menunjukkan masing-masing pengaruh independen terhadap perubahan dependen jika p-value lebih kecil dari nyata yang ditentukan atau T hitung > T tabel Hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang diusulkan dan uji t adalah:

- 1) T hitung > T table, atau p-value <  $H_0$ , ditolak  $H_0$ , yang berarti bahwa suatu faktor X memiliki pengaruh terhadap faktor Y.
- 2) T hitung > T tabel' atau p-value >  $H_0$ , diterima  $H_0$ , yang berarti bahwa suatu faktor X tidak mempunyai pengaruh terhadap faktor Y.

**b. Uji Koefisien Determinasi (Uji R)**

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya variabel-variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta : Teras, 2015). Hal. 99  
Dn Mardiasmo.(2015).Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta:  
Andiyogyakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Hafnati Rahmi,2020. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan Dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepercayaan Stakeholder*.Padang.
- Ida Ayu Putu Ari Krisnayanti, 2013 *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Indra Bastian, 2014 . *Akuntansi untuk kecamatan dan desa* Jakarta : Erlangga. Indra Bastian, 2018, Akuntansi kesehatan jakarta: Erlangga.
- Irma Erawati, 2017, Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan PallanggaKabupaten Gowa. *Jurnal Office, Vol.3, No.1, 2017*
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi 2016, *Analisis Laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Ykpn.
- Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2010), 14.
- Sryrahayu 2022 Presepsi skaheholders terhadap dampak implementasi MBKM ( Merdekabelajar-kampus merdeka) *jurnal pendidikan vol 12 No 2. 2022*
- Sugiyono. 2018. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods).Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung :Alfabeta V. Wiratna Sujarweni, 2015, *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Baru
- Pressps://wahjudinsumpeno.wordpress.com/2012/07/23/teori-pemangku-kepentingan/dan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. (2011). *Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP*. Jakarta